

## DAFTAR ISTILAH

<b>Istilah</b>	<b>Pengertian</b>
Akuntansi	Proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya
APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Aset	Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya
Aset tetap gedung dan bangunan	Gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai
Aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan	Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai
Aset tetap konstruksi dalam pengerjaan	Aset tetap konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya
Aset tetap lainnya	Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang ada, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai
Aset tetap peralatan dan mesin	Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai
Aset tetap tanah	Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai
Badan Publik	Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.
Basis AkruaI	Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar
Basis Kas	Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar
Basis Kas menuju akruaI	Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dan basis akruaI untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana
Belanja Daerah	Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
Belanja Negara	Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
Bendahara	setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah
Bendahara Penerimaan	orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah
Bendahara Pengeluaran	Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah

Bidang Akuntansi	Bidang di DPKAD yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang analisa, bidang pelaporan keuangan, serta bidang penatausahaan keuangan.
Bidang Anggaran	Bidang di DPKAD yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang perencanaan anggaran, bidang penyusunan anggaran, serta bidang administrasi anggaran.
Bidang Aset	Bidang di DPKAD yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang administrasi aset, bidang pengamanan aset, dan bidang penilaian aset.
Bidang Pajak Daerah	Bagian di DPKAD yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pendaftaran dan pendataan, bidang penetapan, serta bidang penagihan.
Bidang Perbendaharaan	Bidang di DPKAD yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang belanja non gaji, bidang belanja gaji serta bidang verifikasi dan evaluasi.
Bidang Perimbangan Keuangan dan lain-Lain Pendapatan	Bidang di DPKAD yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang bagi hasil pajak, bidang bagi hasil bukan pajak, serta bidang pinjaman dan lain-lain pendapatan.
BKU	Buku Kas Umum
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah, instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPK RI	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPPT	Badan Perijinan Pelayanan Terpadu
BUD	Bendahara Umum Daerah, pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah
Buletin Teknis	Informasi yang diterbitkan oleh KSAP yang memberikan arahan/pedoman secara tepat waktu untuk mengatasi masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan yang timbul.
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan	Laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial
CR	Current ratio
Double Entry	Sistem tata buku berpasangan. Sistem pencatatan transaksi ekonomi yang dilakukan dengan mencatatnya dua kali
DPA	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPAL-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPKAD	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DPPA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD-dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran
DTKP	Dinas Tata Kota dan Perumahan
Ekuitas	Kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah
Entitas Akuntansi	Unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyetenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan

Entitas Pelaporan	Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan
FASB	Financial Accounting Standard Board
GASB	The Government Accounting Standard Board
GUP	Ganti Uang Persediaan
IAI	Ikatan Akuntan Indonesia
Informasi Publik	informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik
IFAC	International Federations of Accountants
Investasi Jangka Panjang Permanen	Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan
IPSAP	Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, IPSAP adalah klarifikasi, penjelasan, dan uraian lebih lanjut atas pernyataan SAP yang diterbitkan oleh KSAP
IPSAS (B)	International Public Sector Accounting Standards (Board)
IT	Information Technology
IWP	Iuran Wajib Pegawai
JFA	Jabatan Fungsional Auditor
Kas Daerah	tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
Kewajiban	Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah
KKN	Korupsi Kolusi dan Nepotisme
KL	Kementerian Negara dan Lembaga
Konsolidasi	Proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian
KPA/KPB	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
KSAP	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yang bertugas untuk menyusun standar akuntansi pemerintahan yang berlaku baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku umum
KUA	Kebijakan Umum Anggaran, dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
LA	Long term liabilities to total assets
Laporan keuangan	Bagian dari proses pelaporan keuangan atau hasil dari proses akuntansi
Laporan Arus Kas	Laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu
Laporan keuangan konsolidasian	suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal
Laporan Perubahan Ekuitas	Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	Laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan

LO	Laporan Operasional, LRA yang disusun kembali dengan metode akuntansi basis akrual yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan
LRA	Laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan
LS	Langsung
Metode Biaya	Metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan
Metode Ekuitas	Metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi
Neraca	Laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas pada tanggal tertentu
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development
Operating expense	Beban operasi
Operating revenue	Pendapatan operasi
Opini	Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria : a. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; b. kecukupan pengungkapan; c. kepatuhan terhadap peraturan perundangan; d. efektivitas sistem pengendalian intern
Opini TMP/Disclaimer	Tidak Memberikan Pendapat/Pernyataan Menolak Memberikan Opini, menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemerintahan.
Opini TW/Adverse	Opini Tidak Wajar, menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
Opini WDP	Opini Wajar Dengan Pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan
Opini WTP	Opini Wajar Tanpa Pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
OROE	Operating Revenue to Operating Expense
PA	Pengguna Anggaran, pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah
PB	Pengguna Barang, pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
Pembiayaan	Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya
Pendapatan Daerah	Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
Pendapatan Negara	Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
Penerimaan Pembiayaan	semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya
Pengeluaran Pembiayaan	pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

Pengurus Barang	Pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja
Persediaan	Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
Piutang Daerah	Jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
PPA	Prioritas dan Plafon Anggaran, program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
PPKD	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, kepala badan/ dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah
PPK-SKPD	Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah,
PPTK	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PSAP	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
<i>Quality Control</i>	Pengawasan oleh pihak internal untuk meyakini kesesuaian kegiatan dengan SOP dan mencapai tujuannya
<i>Quality Assurance</i>	Pemeriksaan oleh pihak eksternal untuk meyakini kesesuaian kegiatan dengan SOP dan mencapai tujuannya
RKA	Rencana Kerja Anggaran
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKUD	Rekening Kas Umum Daerah, rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan
ROA	Return on assets
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
Siapda	Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah, sistem informasi berbasis komputer untuk penerapan akuntansi basis akrual yang digunakan oleh Pemerintah Kota Semarang
SIKPA	Sisa Kurang Penggunaan Anggaran, selisih kurang realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran
SILPA	Sisa Lebih Penggunaan Anggaran, selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran
SIM BPHTB	Sistem Informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
SIM PBB	Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan
Simbada	Sistem Informasi Barang Daerah
Simpad	Sistem Informasi Pajak Daerah
Single Entry	Sistem pencatatan transaksi ekonomi yang dilakukan dengan mencatatnya satu kali
SIPD	Sistem Informasi Pemerintah Daerah
SKP	Surat Ketetapan Pajak
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah, perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
SKPKD	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah,
SKR	Surat Ketetapan Retribusi
SOP	Standard Operating Procedures
SOTK	Struktur Organisasi dan Tata Kelola
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SPD	Surat Penyediaan Dana
SPJ	Surat Pertanggungjawaban
SPM	Surat Perintah Membayar

SPP	Surat Permintaan Pembayaran
SPTU	Surat Perintah Transfer Uang
STS	Surat Tanda Setoran
TAPD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Taperum	Tabungan Perumahan
TUP	Tambahan Uang Persediaan
UJB-Reklame	Uang Jaminan Bongkar-Reklame
UP	Uang Persediaan
UPTD Kas Daerah	Unit Pelayanan Teknis Terpadu-Kas Daerah
Utang Daerah	Jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah

## Indeks Nama

Aaron	91	Oetoyo Koesoemo, R	257
AB Triharta	206, 331, 335, 374	O'toole	91, 501
Abdulmadjid	259	Palumbo	136, 195, 494, 502
Djojoaningrat, Mr			
Abraham Kaplan	69	Pandan Arang I, Kyai	256
		Ageng	
Adil Najam	119, 120, 129, 131, 133, 195, 428, 472, 476, 489	Pandan Arang II	256, 257
Adriana Tiron Tudor	40, 47, 438, 439	Pandan Arang III	257
Alap-alap, Mas	257	Pandan Arang, Raden	255
Tumenggung			
Ali Farazmand	67, 69, 475	Parsons	10, 494, 502
Allison	157, 158, 159, 436	Patah, R	258
Andreas Bergmann, Prof Dr	315, 334, 377	Patton	157, 158, 159, 436
Andrew Dunshire	94, 409	Paudel	26, 30, 501
Ari Purbono, SE,SH	205, 252, 317, 330, 343, 374	Plastrik	58
Armajani	56	Prawiroprojo, Mas	257
		Tumenggung	
Arum Prastiwi	42, 49	Prawotosudibyo, R	258
Astika Darman	42, 49	Pressman	91, 97
Authorakala and Reid	420	Purwanto	95, 409
Bachrach	10	Puspita Dewi Susanti	314, 342
Baratz	10	Riant Nugroho	25, 69, 71, 72, 74, 75, 79, 82, 86, 93, 136, 494, 501, 502, 503, 507
Barzelay	56	Ripley	92, 502
Biklen	214	Robert K Yin	197
Binti Muchsini	41, 48	Robert Steward	69
Blondal	405, 480	Rodica Blidisel	40, 47, 438, 439
Boediono	23	Rossi	137, 494
Bogdan	214	Russel	3, 6, 24, 28, 29, 427, 468, 491, 497, 498, 509
Bowman	110, 129, 195	Sabatier	35, 91, 101, 102, 128, 130, 133, 135, 194, 472, 477, 502
Budi Mulyana	39, 47	Saman Mohammadi	44, 50
Budi Winarno	90, 501	Shafritz	3, 6, 24, 28, 29, 427, 468, 491, 497, 498, 509
Carl Van Horn	93, 98, 105, 106, 108, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 194, 428, 473, 502, 510	Shoulders	157, 158, 159, 436
Carter, Presiden	493	Slamet Tirtosubroto, R	258
Chairul Iman	40, 48	Smith	157, 158, 159, 436
Condronegoro, RM	257	Soebagyono	259
		Tjondrokoesoemo, RM	
D Osborne	58	Soemarmo HS, M.Si, Drs. H.	259, 372
David Easton	69, 78	Soeparno, Letkol	259

## Indeks Nama

Denhart	57, 59	Soetrisno Suharto, Kolonel, H	259
Diana Tien Irafhahmi	39, 47	Suhardi, Mayor	258
Donald Van Meter	93, 105, 106, 108, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 194, 428, 473, 502, 510	Suharto	44, 45, 51
Duhovnik	176, 177, 427	Sukawi Sutarip SH, H.	21, 259, 309, 372
Dwight Waldo	55	Sultan Hadiwijaya	256
Dwiyanto	1, 62, 64	Sultan Pajang	256
Edwards III	8, 19, 20, 29, 95, 110, 112, 114, 118, 122, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 194, 195, 217, 219, 220, 221, 222, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 236, 239, 240, 241, 242, 336, 337, 351, 428, 441, 442, 443, 444, 445, 465, 468, 472, 473, 474, 482, 483, 487, 489, 490, 492, 493, 495, 496, 499, 503, 505, 506, 509, 510, 511, 512	Suwitri	35, 53, 57, 90, 101, 128, 130
Eka Novalina	43, 50	T Gaebler	58
ES Overman	56	Tembayat, Sunan	257
Franklin	92, 502	Thomas R Dye	69, 73
Freeman	137, 157, 158, 159, 436, 494	Tumenggung Tambi, Mas R	257
GD Garson	56	Udoji	25, 90
Geert Hofstede	79, 80, 82, 400, 446, 448, 449, 469, 470, 478, 484	Virginia Nur Rahmanti	42, 49
George Edwards III	19	Wachid Nurmiyanto, Ir	205, 252, 317, 331, 343, 374, 380
Gibson	5, 12, 437	Wahab	25, 69, 90, 409
Goggin	99, 100, 110, 129, 195	Wahyudi Prakarsa	412
Gunn	108, 129, 195, 489, 510	Warsito Soegiarto, Letkol , R	259
Hadijanto, Kolonel	259	Widavsky	91
Hadisoebeno	259	William Dunn	74, 83, 84, 85, 136, 195, 494, 502, 507
Sosrowardoyo, RM		Winarno	20, 29, 92, 93, 105, 108, 110, 121, 122, 126, 129, 130, 131, 428, 473, 489, 502, 510
Harold Laswell	69	Winter	99
Harun Harun	44, 51	Wongsorejo, Mas	257
Hendrar Prihadi, SE., MM.	254, 259, 260, 372	Tumenggung	
Hogwood	108, 129, 131, 195, 489, 510	Wuryanto, Mr	259
Ichsan, Mr	258	Wynne	11, 12, 24, 29, 179, 181, 182, 190, 194, 195, 421, 425, 438, 485, 509, 510
Ileana Steccolini	38, 46	Yearzy Ferdian SE., Akt, M.Si.	205, 252, 316, 330, 374
Imam Soeparto	259	Yeremias T Keban	53, 56, 57, 59, 61
Tjakrajoeda SH, Kol, H.			

## Indeks Nama

Imam Sudjahri, Mr	258
Indra Bastian, Prof	206, 331, 374
James Anderson	69
James Lester	69, 99, 100, 110, 129, 195
Jeffrey L	91
John Gaus	54
JR	157, 158, 159, 436
Julius K Nyerere	67
Kalijaga, Sunan	256
Kanoman, Pangeran	257
Ketib, Raden	257
Khan	177, 188, 190, 191, 194, 195, 404, 420, 477, 486, 489, 510
Koesoedibyono, Mr	259
Kuhn	52, 53
Lester	69, 99, 100, 110, 129, 195
Liza Suhandika	314, 343
Lockhart	69
Luther H Gullick	54
Lyndall Urwick	54
M Sumardjito	257
Made Pandan, Pangeran	255, 256
Mahardika Sari	314, 342
Marini	55
Mardiasmo, Prof	412
Matland	97, 98, 124, 125, 409
Mayes	177, 188, 190, 191, 194, 195, 404, 420, 477, 486, 489, 510
Mazmanian	35, 91, 101, 102, 128, 130, 133, 135, 194, 472, 477, 502
McClintock	95
McLaughlin	98
Merilee S Grindle	25, 35, 402, 428, 441, 442, 472, 477, 489, 502, 510
Moleong	200, 245
Mulya	11, 420
Nicholas Henry	52, 56